

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.W. Widjaja. 2006. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ani Sri Rahayu. 2018. *Pengantar Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djulaeka dan Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rosdakarya Musanef. 1983. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Sudikno Mertokusumo. 2019 *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka.
- Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Susanti Agustina. 2022. *Dibalik Perekrutan Guru Lewat PPPK*. Jakarta: Buku Kompas.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang *Administrasi Pemerintah*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang *Aparatur Sipil Negara*

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang *Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja*

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang *Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja* sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Peraturan Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang *Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang *Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang *Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang *Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional*

Surat Keputusan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 tentang *PPPK Paruh Waktu*

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang *Perubahan atas Peraturan Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang* Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan*.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 60 Tahun 2018 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang*

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 33 Tahun 2022 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Padang*

C. Jurnal

Anwar Ariffin. "Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Antara Cita-Cita dan Realitas." *Jurnal Ketatanegaraan Vol. 07.* (2018). hlm 2

Emanuel De Jesus¹, Yohanes G.Tuba Helan, & Norani Asnawi. "Hak Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Ditinjau dari Segi Keadilan". *Federalisme : Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No.4.* (2024). hlm 226

Faiq Tobroni. "Tinjauan HAM dalam Regulasi PPPK dengan Intertekstualitas Teks Hukum". *Jurnal HAM Vol. 11 No. 2.* (2020)

Lucy Afrilia dan Nasha Shaira, "Tinjauan Penerapan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Guru PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja)". *Kultura Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 6.* (2024)

M. Shabir U. "Kedudukan Guru sebagai Pendidik (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban, dan Kompetensi Guru)". *Jurnal Auladun Vol. 2 No. 2* (2015)

Naftali Yesaya Gabriel Sumanti dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Guru Honorer Setelah Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 TAHUN 2018". *Lex Privatum Vol. 13 No. 4.* (2024) hlm 3.

Rikha Rahmiyati Dhani. "Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum", *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan Vol. 9 No. 1* (2020) hlm 46.

Sajipto Raharjo. "Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah". *Jurnal Masalah Hukum.* (1993)

Siti Lathifatus Sun'iyah. "Peran AGPAII dalam Learning Community dan Learning Management System Bagi Guru Pai". *Fakultas Agama Islam (FAI) UNISDA Lamongan*. (2021). hlm 116

Vina Sabina, Maychellina, dan Sultoni Fikri. “Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan”. *Journal Evidence of Law Vol. 2 No. 1.* (2023) hlm 22

D. Kamus

Henry Campbell Black. 1990. *Black Law Dictionary*. West Publishing.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. Cetakan 1. Jakarta: Balai Pustaka

E. Website

Badan Pusat Statistik Kota Padang ,Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Padang,2023/2024,<https://padangkota.bps.go.id/id/statisticstable/3/VWtKTmFFbDZaSFJWWVhOYU16WmhaRzlCYlM5Wlp6MDkjMw==/jumlah-sekolah--guru--dan-murid-sekolah-dasar--sddibawah-kementerian-pendidikan--kebudayaan--riset--dan-teknologi--menurut-kecamatan-di-kota-padang-2023.html?year=2023>

Badan Pusat Statistik Kota Padang, “Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Padang, 2024/2025”, <https://www.diknas-padang.org/mod.php?mod=about&op=viewabout&aboutid=4>, dikunjungi pada 7 Juli 2025 Pukul 13.10

BKPSDM Kota Padang, “Visi, Misi dan Motto BKPSDM Kota Padang”, [https://bkd.padang.go.id/Visi, Misi dan Motto-bkpsdm-kota-padang](https://bkd.padang.go.id/Visi,Misi%20dan%20Motto-bkpsdm-kota-padang), diakses 12 April Pukul 17.55 WIB

Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, “Data Guru”, <https://dapo.kemendikdasmen.go.id/guru/1/080000>, dikunjungi pada 22 Juli 2025 Pukul 13.10

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, “ Pejabat Struktural”, <https://www.diknas-padang.org/mod.php?mod=about&op=viewabout&aboutid=4>, dikunjungi pada 10 April 2025 Pukul 17.04.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, “Tugas Pokok dan Fungsi”, <https://www.diknas-padang.org/mod.php?mod=about&op=viewabout&aboutid=7>, dikunjungi pada 10 April 2025 Pukul 16.46

Disdik Kota Padang, “Visi Misi dan Moto Disdik Kota Padang”, <https://disdik.padang.go.id/index.php>, diakses 11 April 2025 pukul 18.03

Media Sosial Instagram dpw_agpaili_sumbar.
https://www.instagram.com/p/DHyE_QAz-o9/?igsh=MWIyc2Q4NXY1dnptMQ%3D%3D, diakses 23 Juni 2025 pukul 23.11

Mesyia Muhammad, “Diangkat PPPK Malah Kehilangan TPG, Tunjangan Rp. 38,4 Juta Melayang”, <https://m.jpnn.com/news/diangkat-pppk-malah-kehilangan-tpg-tunjangan-rp-384-juta-melayang?page=3>, dikunjungi pada 21 November 2024 Pukul 15.00

Tim Hukum Online, “Perlindungan hukum: Pengertian, Unsur dan Contohnya”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/?page=1>, dikunjungi pada 21 November 2024 Pukul 00.10.

M. Ilham Ramadhan Avisena, Gaji Guru PPPK Masuk dalam Alokasi DAU, https://mediaindonesia.com/humaniora/433973/gaji-guru-pppk-masuk-dalam-alokasi-dau#goog_rewarded, Dikunjungi pada 28 Agustus 2025 Pukul 01.20

F. Skripsi dan Disertasi

Setiono. “Rule of Law”. Disertasi Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Doktor Ilmu Hukum. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm 3

G. Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Afridon Candra, S.Pd., Guru PPPK SDN 08 Alang Lawas pada tanggal 21 April 2025 pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Agustini S.Pd M.M., selaku Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi ASN BKPSDM Kota Padang pada tanggal 10 Juni 2025 pukul 09.10 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Engla Devia Syari, S.Pd., Guru PPPK SMPN 9 Padang, pada tanggal 7 Agustus 2025 pukul 09.35 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Fuji Rahayu, S.Pd., Guru PPPK SDN 14 Gurun Laweh, pada tanggal 28 April 2025 pukul 14.20 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Hafsyah M.Pd. T., Kasi Tenaga Teknis Dikdas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang pada tanggal 21 April 2025 pukul 16.21 WIB

Hasil wawancara dengan Ibu Laili Aulia, S.Pd., Guru PPPK SDN 32
Tanjung Aur pada tanggal 29 April 2025 pukul 09.30 WIB

